

**MEMAHAMI HAKIKAT PEMBELAJARAN PKN SEBAGAI PENDIDIKAN KARAKTER DI
SEKOLAH DASAR**

Komang Pipit Arisandhi¹, Dewa Bagus Sanjaya², I Nengah Suastika³
Program Studi Pendidikan Dasar Universitas Pendidikan Ganesha^{1,2,3}

Alamat e-mail : [1,
\[2bagus.sanjaya@undiksha.ac.id\]\(mailto:bagus.sanjaya@undiksha.ac.id\), \[3nengah.suastika@undiksha.ac.id\]\(mailto:nengah.suastika@undiksha.ac.id\)](mailto:pipit.arisandhi@student.undiksha.ac.id)

ABSTRACT

Civics Education (PKn) at the elementary school level plays a strategic role in shaping the character and identity of the nation. As a multidimensional subject, PKn not only teaches legal and political aspects but also instills moral values, democracy, and nationalism based on the principles of Pancasila. This article explores the essence of PKn at the elementary level, the instructional principles applied, and its urgency in developing students' character from an early age. PKn instruction emphasizes active, cooperative, participatory, and reactive learning approaches aimed at fostering intelligent, responsible, and morally upright citizens. In the context of national character building, PKn serves as a vital medium for internalizing national values and social ethics amidst the challenges of moral decline among the younger generation. The article recommends that PKn teachers fulfill their roles optimally through comprehensive and collaborative approaches, while cultivating a school culture that supports positive character formation. Thus, PKn becomes a foundational pillar in preparing future generations who are patriotic and embody the values of Pancasila.

Keywords: Civics Education, Character, Elementary School, Pancasila, Active Learning

ABSTRAK

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Sekolah Dasar memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan jati diri bangsa. Sebagai mata pelajaran multidimensional, PKn tidak hanya mengajarkan aspek hukum dan politik, tetapi juga nilai-nilai moral, demokrasi, dan kebangsaan yang berlandaskan Pancasila. Artikel ini mengkaji hakikat PKn di tingkat dasar, prinsip-prinsip pembelajaran yang diterapkan, serta urgensinya dalam membangun karakter peserta didik sejak dini. Pembelajaran PKn menekankan pada pendekatan aktif, kooperatif, partisipatif, dan reaktif, yang bertujuan membentuk warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan berkepribadian luhur. Dalam konteks pembangunan karakter bangsa, PKn berperan penting sebagai sarana internalisasi nilai-nilai kebangsaan dan etika

sosial di tengah tantangan kemerosotan moral generasi muda. Artikel ini merekomendasikan agar guru PKn menjalankan perannya secara optimal melalui pendekatan komprehensif dan kolaboratif, serta menciptakan kultur sekolah yang mendukung pembentukan karakter positif. Dengan demikian, PKn menjadi fondasi utama dalam mencetak generasi penerus yang cinta tanah air dan berkepribadian pancasilais.

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Karakter, Sekolah Dasar, Pancasila, Pembelajaran Aktif

A. Pendahuluan

Pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum sekolah di Indonesia mulai dikenal sejak diberlakukannya pelajaran civics pada tahun 1962. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran dengan visi utama sebagai pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional, yang mencakup pendidikan nilai demokrasi, pendidikan moral, pendidikan sosial, dan masalah pendidikan politik. Oleh karena itu pendidikan Kewarganegaraan dinilai sebagai mata pelajaran yang mengusung pendidikan nilai dan moral. Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan berfikir kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi berbagai macam isu kewarganegaraan. Berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab, serta bertindak cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara, dan diharapkan mampu berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia. Melalui pendidikan kewarganegaraan siswa diharapkan dapat menjadi warga negara yang baik, yaitu warga negara yang tahu, bersedia, dan sadar akan hak dan kewajibannya.

Banyaknya pergeseran trend kehidupan pelajar di Indonesia saat ini menjadi sebuah masalah yang sangat penting bagi pendidikan di Indonesia. Banyaknya kasus kenakalan remaja yang mulai mengkhawatirkan para orang tua menjadi sebuah tanggung jawab utama untuk seluruh bagian dari pihak-pihak dalam sebuah lembaga pendidikan sekolah.

Kaelan (2010) menambahkan bahwa kini, kita dihadapkan pada semakin lunturnya nasionalisme bangsa, lemahnya penegakan hukum, korupsi yang semakin merebak

dengan wajah baru, kolusi dan nepotisme dengan wajah demokrasi, primordialisme, etik politik kalangan elit kita terutama para penyelenggara negara dewasa ini sangat mengecewakan rakyat.

Berdasarkan realitas kehidupan kebangsaan dan kenegaraan dewasa ini yang dihinggapai berbagai krisis, maka menjadi sangat penting untuk direalisasikan pembangunan karakter bangsa. Proses pembangunan karakter bangsa tidak dapat dilepaskan dari proses pendidikan. Dalam hal ini, Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat menjadi sarana pembangunan karakter bangsa yang bermartabat.

Berikut dijabarkan definisi kewarganegaraan menurut para ahli yaitu 1) Azyumardi Azra bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengkaji dan membahas tentang pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, *rule of law*, HAM, hak dan kewajiban warga negara serta proses demokrasi; 2) Zamroni bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis; 3) Merphin

Panjaitan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi muda menjadi warga negara yang demokratis dan partisipatif melalui suatu pendidikan yang dianalogial; 4) Soedijarto bahwa pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi warganegara yang secara politik dewasa dan ikut serta membangun sistem politik yang demokratis; 6) Henry Randall menyatakan bahwa civics adalah ilmu kewarganegaraan yang membicarakan hubungan manusia dengan a) manusia dalam perkumpulan-perkumpulan yang terorganisasi (sosial, ekonomi, politik) dan b) individu-individu dengan negara; dan 7) Civitas Internasional menurut Civic Education adalah pendidikan yang mencakup pemahaman dasar tentang cara i dan lembaga-lembaganya, pemahaman tentang *rule of law*, HAM, penguatan ketrampilan partisipatif yang demokratis, pengembangan budaya demokratis dan perdamaian (Farhan Nurdiansyah & Anggraeni Dewi, 2021).

Definisi pendidikan karakter menurut Thomas Lickona secara

seederhana yaitu pendidikan karakter sebagai segala usaha yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter siswa. Tetapi untuk mengetahui pengertian yang tepat, dapat dikemukakan disini definisi pendidikan karakter yang menyatakan bahwa pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti (Loloagin et al., 2023). Karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. Karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut, serta merupakan “mesin” yang mendorong bagaimana seorang bertindak, bersikap, berucap, dan merespon sesuatu. Menurut kamus psikologi, karakter adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang, dan biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap (Saifurrohman, 2014).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis dan menyintesis berbagai literatur yang membahas tentang Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) dan pendidikan karakter di sekolah dasar.

Pada bagian ini menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penelitian yang dianggap perlu untuk memperkuat naskah yang dipublikasikan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) atau studi literatur. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer dari lapangan, melainkan mengandalkan sumber-sumber tertulis, baik itu buku, artikel ilmiah, jurnal, laporan penelitian, dan sumber online yang relevan.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah berbagai literatur yang mencakup 1) Buku teks yang membahas tentang Pendidikan Kewarganegaraan (PKN), pendidikan karakter, dan implementasi keduanya di sekolah dasar; 2) Artikel jurnal ilmiah yang membahas tentang praktik pembelajaran PKN dan

kontribusinya dalam pendidikan karakter; 3) Tesis/disertasi yang mengkaji pendidikan karakter dan pengajaran PKN di tingkat pendidikan dasar; 4) Laporan penelitian dari lembaga pendidikan atau pemerintah yang terkait dengan kurikulum PKN dan karakter di sekolah dasar; dan 5) Sumber daring yang terpercaya, seperti artikel akademik, kebijakan pendidikan yang diterbitkan oleh kementerian pendidikan, dan laporan hasil penelitian dari universitas atau lembaga pendidikan.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengakses, dan mempelajari sumber-sumber literatur yang relevan. Beberapa teknik yang digunakan adalah 1) Pencarian literatur: Menggunakan database akademik seperti Google Scholar, JSTOR, dan ProQuest untuk mencari artikel dan jurnal ilmiah yang relevan; 2) Pemilahan sumber: Memilih sumber yang kredibel dan relevan dengan topik, misalnya buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit terkemuka atau jurnal yang telah terakreditasi; 3) Dokumentasi: Mengunduh, membaca, dan mencatat informasi penting dari sumber-sumber tersebut.

Data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut 1) Identifikasi tema: Menyusun tema-tema utama yang muncul dari literatur yang diteliti, misalnya tentang konsep pendidikan karakter, prinsip-prinsip PKN, serta hubungan antara keduanya dalam konteks sekolah dasar; 2) Sintesis teori: Menghubungkan berbagai teori yang ada mengenai pendidikan karakter dan PKN, serta mencari hubungan atau perbedaan antar teori tersebut; 3) Evaluasi dan analisis kritis: Menganalisis sejauh mana pendidikan karakter diterapkan dalam pembelajaran PKN di sekolah dasar dan mengevaluasi kebijakan serta pendekatan yang ada.

Keabsahan data dalam studi pustaka ini lebih berkaitan dengan validitas sumber yang digunakan. Untuk memastikan keabsahan dan kualitas informasi yang diperoleh, beberapa langkah yang dapat diambil adalah: 1) Triangulasi sumber: Menggunakan berbagai sumber yang beragam (buku, artikel, laporan penelitian) untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan lebih objektif dan 2) Kritik sumber:

Memeriksa kredibilitas sumber yang digunakan, apakah sumber tersebut diterbitkan oleh lembaga yang terpercaya, dan apakah informasi yang ada relevan serta akurat.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bidang studi yang bersifat multifaset dengan konteks lintas bidang keilmuan, dan merupakan bidang kajian yang multidimensional sebagai integrasi dari disiplin ilmu politik, hukum, psikologi dan pendidikan, maupun disiplin ilmu lainnya yang dapat mendukung pembentukan warga negara yang baik. Sifat multidimensional inilah yang membuat bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan dapat disikapi sebagai pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan nilai dan moral, pendidikan politik, pendidikan bangsa, pendidikan kemasyarakatan, pendidikan hukum dan hak asasi manusia, serta pendidikan demokrasi. Secara epistemologis, Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai

suatu bidang pendidikan keilmuan yang merupakan pengembangan salah satu dari lima tradisi “social studies” yakni “citizenship transmission” seperti yang dikemukakan oleh Winataputra bahwa saat ini tradisi itu sudah berkembang pesat menjadi suatu “body of knowledge” yang dikenal dan memiliki paradigma sistematis, yang di dalamnya terdapat tiga domain “citizenship education” yakni, ranah akademik, ranah kurikuler, dan ranah sosial kultural. Mata pelajaran pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang wajib dipelajari dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi (Ayu Made Pipit Miranti et al., 2022).

Hakikat pendidikan kewarganegaraan di Sekolah Dasar adalah sebagai program pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa yang diharapkan menjadi jati diri yang diwujudkan dalam bentuk perilaku pada kehidupan sehari-hari. Hakikat pembelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik yang diarahkan untuk menjadi patriot

pembela bangsa dan negara. Pendidikan kewarganegaraan adalah pelajaran pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial, bahasa, usia dan suku bangsa untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter sebagaimana yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang mengupayakan pembentukan sebagai warga negara yang baik, yakni memiliki penalaran moral untuk bertindak dalam urusan publik maupun privat. Pendidikan kewarganegaraan diperlukan dalam kehidupan manusia sebagai warga negara, supaya dapat mengetahui dan melakukan pemecahan masalah sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Pendidikan kewarganegaraan di Sekolah Dasar diharapkan dapat melaksanakan pembelajaran yang dapat mengaitkan materi pembelajaran dengan keadaan yang sedang terjadi atau keadaan faktual, sehingga peserta didik mampu untuk menyelesaikan masalah dengan menerapkan pengetahuan yang mereka miliki.

Prinsip – prinsip Pembelajaran PKN di SD

Prinsip dasar pembelajaran pendidikan kewarganegaraan mengacu pada sejumlah prinsip dasar pembelajaran. Menurut pendapat Budimansyah, prinsip-prinsip pembelajaran tersebut adalah prinsip belajar siswa aktif (student active learning), kelompok belajar kooperatif (cooperative learning), pembelajaran partisipatorik, dan mengajar yang reaktif (reaktive learning) (Refdawati, 2019). Selanjutnya keempat prinsip tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Prinsip Belajar Siswa Aktif

Model ini menganut prinsip belajar siswa aktif. Aktivitas siswa hampir di seluruh proses pembelajaran, dari mulai fase perencanaan di kelas, kegiatan lapangan, dan pelaporan. Dalam fase perencanaan aktivitas siswa terlihat pada saat mengidentifikasi masalah dengan menggunakan teknik bursa ide (brain- storming). Setiap siswa boleh menyampaikan masalah yang menarik baginya, disamping tentu saja yang berkaitan dengan materi pelajaran. Setelah masalah terkumpul, siswa melakukan voting untuk memilih satu masalah untuk kajian kelas.

Dalam fase kegiatan lapangan, aktivitas siswa lebih tampak. Dengan berbagai teknik (misalnya dengan wawancara, pengamatan, kuesioner, dan lain-lain) mereka mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang menjadi kajian kelas mereka. Untuk melengkapi data dan informasi tersebut, mereka mengambil foto, membuat sketsa, membuat kliping, bahkan adakalanya mengabadikan peristiwa penting dalam video.

2. Kelompok Belajar Kooperatif

Proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan juga menerapkan prinsip belajar kooperatif, yaitu proses pembelajaran yang berbasis kerja sama. Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama antar siswa dan antar komponen-komponen lain di sekolah, termasuk kerjasama sekolah dengan orang tua siswa dan lembaga terkait. Kerja sama antar siswa jelas terlihat pada saat kelas sudah memilih satu masalah untuk bahan kajian bersama.

Dengan komponen-komponen sekolah lainnya juga seringkali harus dilakukan kerjasama. Misalnya pada saat para siswa hendak mengumpulkan data dan informasi lapangan sepulang dari sekolah,

bersamaan waktunya dengan jadwal latihan olah raga yang diundur atau kunjungan lapangan yang diubah. Kasus seperti itu memerlukan kerjasama, walaupun dalam lingkup kecil dan sederhana. Hal serupa juga seringkali terjadi dengan pihak keluarga. Orang tua perlu juga diberi pemahaman, manakala anaknya pulang agak terlambat dari sekolah karena melakukan kunjungan lapangan terlebih dahulu. Sekali lagi, dari peristiwa ini pun tampak perlunya kerjasama antara sekolah dengan orang tua dalam upaya membangun kesepahaman.

Kerja sama dengan lembaga terkait diperlukan pada saat para siswa merencanakan mengunjungi lembaga tertentu atau meninjau suatu kawasan yang menjadi tanggung jawab lembaga tertentu. Misalnya mengunjungi dinas perparkiran. Mengunjungi kantor bupati atau wali kota untuk mengetahui kebijakan mengenai penertiban pedagang kaki lima. Mengamati dampak pembuangan limbah pabrik pada suatu kawasan tertentu, dan sebagainya. Kegiatan para siswa tentu saja perlu dibekali surat pengantar dari kepala sekolah selaku penanggungjawab kegiatan sekolah.

3. Pembelajaran Partisipatorik

Selain prinsip pembelajaran di atas, Pendidikan Kewarganegaraan juga menganut prinsip dasar pembelajaran partisipatorik, sebab melalui model ini siswa belajar sambil melakoni (*learning by doing*). Salah satu bentuk pelakonan itu adalah siswa belajar hidup berdemokrasi. Sebab dalam tiap langkah model ini memiliki makna yang ada hubungannya dengan praktik hidup berdemokrasi.

Sebagai contoh pada saat memilih masalah untuk kajian kelas memilih makna bahwa siswa dapat menghargai dan menerima pendapat yang didukung suara terbanyak. Pada saat berlangsungnya perdebatan, siswa belajar mengemukakan pendapat, mendengarkan pendapat orang lain, menyampaikan kritik dan sebaliknya belajar menerima kritik, dengan tetap berkepala dingin. Proses ini mendukung adagium yang menyatakan bahwa “*democracy is not in heredity but learning*” (demokrasi itu tidak diwariskan, tetapi dipelajari dan dialami). Oleh karena itu, mengajarkan demokrasi itu harus dalam suasana yang demokratis (*teaching democracy in and for democracy*). Tujuan ini hanya dapat

dicapai dengan belajar sambil melakoni atau dengan kata lain harus menggunakan prinsip belajar partisipatorik.

4. Reactive Teaching

Dalam prinsip ini lebih menekankan bagaimana guru menciptakan strategi agar murid mempunyai motivasi belajar. Oleh karena itu, guru harus situasi sehingga materi pembelajaran menarik, tidak membosankan. Guru harus mempunyai sensitivitas yang tinggi untuk segera mengetahui apakah kegiatan pembelajaran sudah membosankan siswa jika hal ini terjadi, guru harus segera mencari cara untuk menanggulangnya. Inilah tipe guru yang reaktif itu.

Ciri guru yang reaktif itu diantaranya sebagai berikut:

1. Menjadikan siswa sebagai pusat kegiatan belajar.
2. Pembelajaran dimulai dengan hal-hal yang sudah diketahui dan dipahami siswa.
3. Selalu berupaya membangkitkan motivasi belajar siswa dengan membuat materi pelajaran sebagai sesuatu hal yang menarik dan berguna bagi kehidupan siswa.

4. Segera mengenali materi atau metode pembelajaran yang membuat siswa bosan. Bila hal ini ditemui, ia segera menanggulangnya.

Pentingnya Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar

Dengan pendidikan kewarganegaraan ini para generasi muda khususnya pada anak sekolah dasar agar diharapkan memiliki kesadaran penuh akan demokrasi dan HAM. Dengan bekal keadaan ini, mereka akan memberikan kontribusi yang berarti dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi bangsa, seperti konflik dan kekerasan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia, dengan cara-cara yang damai dan cerdas.

Mencetak generasi muda yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kejayaan tanah air adalah tujuan berikutnya. Rasa tanggung jawab ini akan tercermin dalam partisipasi aktif generasi muda dalam pembangunan. Generasi muda yang bertanggung jawab akan menyaring pengaruh-pengaruh dari luar, mengambil sisi positifnya dan menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai luhur dan moral bangsa. Akhirnya, Pendidikan

kewarganegaraan diharapkan mampu menumbuhkan sikap setia kepada tanah air dan bersedia dengan tulus ikhlas untuk menyumbangkan setiap potensinya demi kemajuan tanah air walaupun mendapat iming-iming popularitas atau harta dari pihak-pihak lain.

Pengembangan pendidikan di sekolah dasar merupakan tahapan yang sangat penting karena pembentukan karakter anak untuk gemar belajar terjadi pada fase ini. Pada fase pembentukan tersebut terjadi penyimpangan, maka kesalahan yang terjadi akan terbawa pada tahap pendidikan selanjutnya. Oleh sebab itu, guru sekolah dasar harus mampu menunjukkan peningkatan perhatian dan wawasan yang dimilikinya sangat penting dilakukan agar siswa mendapat pendidikan yang berkualitas. Jadi Sebagai seorang guru yang mendidik bagi siswa kita akan menghadapi berbagai permasalahan baik dari guru maupun siswa. Maka dalam pengembangan pendidikan Kewarganegaraan guru harus bisa menerapkan kepada siswa nilai-nilai moral sehingga dapat

Penting pembelajaran pendidikan kewarganegaraann di SD, diharapkan siswa:

1. Memiliki sikap jujur, toleransi.
2. Memiliki sikap disiplin, kerja keras, kreatif, kemandrian.
3. Memiliki sikap demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan.
4. Memiliki sikap cinta tanah air, menghargai, sikap bersahabat.
5. Memiliki sikap cinta damai, gemar membaca, perduli terhadap lingkungan.
6. Memiliki rasa perduli sosial, rasa tanggung jawab, dan sikap religius dan
7. Membentuk karakter bangsa dan identitas nya sebagai warga negara indonestia agar tidak terombang ambing oleh budaya lain.

Peran Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Karakter

Dalam pendidikan formal, mata pelajaran Pendidikan Kewaganegaraan (PKn), atau lebih tepat PPKN atau PMP kembali merupakan satu-satunya Mata Pelajaran yang langsung memberikan pendidikan tentang kewarganegaraan

dan membangun karakter peserta didik (*Character Building*) sesuai dengan Pancasila. Jika pergantian kurikulum ikut mengubah nama dan materi PPKN dengan meninggalkan Pancasila sebagai karakter yang mesti diterapkan kepada peserta didik, dikhawatirkan ke depannya generasi muda Indonesia semakin mengalami keterpurukan karakter atau karakter yang buruk (*bad character*) dapat dibayangkan apa yang akan terjadi dengan negara ini, sekarang saja sudah terlihat dampaknya, maraknya tawuran pelajar yang sudah menjurus kepada tindakan kriminal, pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pelajar dan sebagainya.

Untuk mewujudkan pendidikan PKn sebagai bagian dari pendidikan karakter yang mengandung moral, nilai, demokrasi serta Pancasila, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan guru PKn, yakni sebagai berikut:

Dalam pembelajaran PKn sebaiknya dilakukan dengan pendekatan komprehensif, baik komprehensif dalam isi, metode, maupun dalam keseluruhan proses pendidikan. Isi pendidikan PKn hendaknya meliputi semua

permasalahan yang berkaitan dengan pilihan nilai pribadi sampai nilai-nilai etika yang bersifat umum. Selain itu, guru PKn juga perlu memahami dengan baik mengenai konsep dan indikator karakter yang hendak diinternalisasikan kepada peserta didik supaya guru PKn dapat membuat silabus dan RPP dengan baik sehingga dapat melaksanakan pembelajaran secara efektif.

Metode pembelajaran PKn yang digunakan oleh guru PKn, harus mengembangkan pembelajaran aktif dengan menggunakan banyak metode belajar seperti penanaman nilai melalui studi pustaka, klarifikasi nilai melalui mengamati/mengobservasi, analisis nilai melalui pemecahan masalah/kasus, maupun diskusi kelas untuk menanamkan nilai berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif.

Guru PKn hendaknya menjadi model atau contoh bagi peserta didik sebagai guru yang berkarakter. Jadi dalam setiap sikap dan tindakan guru PKn harus menggambarkan karakter yang diinternalisasikan kepada peserta didiknya.

Untuk mewujudkan PKn sebagai bagian dari pendidikan karakter maka harus menciptakan kultur sekolah

yang kondusif bagi pengembangan karakter peserta didik. Sehingga, kultur sekolah yang berupa norma-norma, nilai-nilai, sikap, harapan-harapan, dan tradisi yang ada di sekolah yang telah diwariskan dan dipegang bersama yang mempengaruhi pola pikir, sikap, dan pola tindakan seluruh warga sekolah. Karena kultur sekolah yang positif dan sehat akan berdampak pada motivasi, prestasi, produktivitas, kepuasan serta kesuksesan siswa dan guru.

Dalam mencapai tujuan ini tentunya Pendidikan PKn tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus bisa berkolaborasi dengan mata pelajaran yang lain, seperti mata pelajaran agama. Pekerjaan ini memang bukan hanya bertumpu pada mata pelajaran PKn tetapi mata pelajaran PKn akan menjadi dasar dan motor dalam setiap kegiatan dan aktivitas yang ada, dan guru PKn akan menjadi pengontrol dan pembimbing dalam pelaksanaannya. Tentu saja, untuk mewujudkan tujuan ini, guru PKn harus didukung dan dibantu oleh semua warga sekolah melalui kerjasama yang baik antara semua pihak, baik oleh kepala sekolah, guru, siswa, serta komite sekolah.

E. Kesimpulan

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang sangat penting bagi setiap individu untuk lebih mencintai bangsa Indonesia, melalui mata pelajaran ini para siswa, mahasiswa, maupun warga negara dididik untuk lebih mencintai bangsa dan negara Indonesia. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan juga dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang cinta terhadap tanah air dan membentuk karakter manusia yang sesuai dengan identitas bangsa.

Hakikat pendidikan kewarganegaraan di Sekolah Dasar adalah sebagai program pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa yang diharapkan menjadi jati diri yang diwujudkan dalam bentuk perilaku pada kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Ayu Made Pipit Miranti, S., Luh Anik Suantari, N., & Made Hendra Wijaya, I. (2022). MANFAAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM.

Prosiding Webinar Nasional Pekan Ilmiah Pelajar (PILAR).

Farhan Nurdiansyah, M., & Anggraeni Dewi, D. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *IJOIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*, 2(02), 105–115.

Kaelan. (2010). *Pendidikan Pancasila. Paradigma.*

Loloagin, G., Rantung, D. A., & Naibaho, L. (2023). Implementasi Pendidikan Karakter Menurut perspektif Thomas Lickona Ditinjau dari Peran Pendidik PAK. *Journal on Education*, 05.

Refdawati. (2019). Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar PKn Dengan Model Pembelajaran Kooperatif Group Investigation (GI) pada Materi HAM di Kelas XI SMA Negeri 1 Muaro Jambi. *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 9.

Saifurrohman. (2014). Pendidikan berbasis Karakter. *Jurnal Tarbawi*, 2.